MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Keuangan

POJK | Nomor 16/2023 | Tahun 2023

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 7 Agustus 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur kewenangan penyidik OJK menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk meminta keterangan dan memblokir rekening di bank.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU P2SK (UU 4/2023) memperluas kewenangan penyidikan OJK. POJK 16/2023 menyesuaikan aturan penyidikan dan mencabut POJK 22/POJK.01/2015.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: penyidikan tindak pidana SJK

Berlaku sejak 7 Agustus 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Tindak pidana yang disidik OJK mencakup perbankan, pasar modal, asuransi/penjaminan/dana pensiun, pembiayaan, inovasi teknologi, dan pelindungan konsumen.

   Sumber: ojk.go.id

2. Penyidik OJK terdiri atas penyidik Polri, PNS tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

   Sumber: ojk.go.id

3. LJK wajib memenuhi permintaan penyidik OJK atas keterangan keadaan keuangan pihak yang diduga terlibat pelanggaran.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Penyidik OJK berwenang memblokir rekening di bank milik orang yang diduga terlibat, sebelum dan saat tahap penyidikan.

Sumber: ojk.go.id

5 Penyidik OJK juga bisa menyidik pencucian uang yang asalnya tindak pidana sektor jasa keuangan, dan meminta hasil analisis ke PPATK.

Sumber: ojk.go.id

6 Pada tahap penyelidikan, terduga dapat mengajukan penyelesaian pelanggaran; OJK menjawab paling lama 30 hari kerja sejak dokumen lengkap.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memenuhi permintaan keterangan dari penyidik OJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga terlibat.
- Melaksanakan pemblokiran rekening yang diminta penyidik OJK.
- Menyiapkan prosedur internal untuk menerima, memverifikasi, dan mendokumentasikan permintaan penyidik.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Legal

Verifikasi keabsahan surat penyidik OJK sebelum memberi data atau memblokir rekening.

Anti Fraud (Fungsi/Unit Anti Fraud)

Simpan bukti fraud dengan rapi; data bisa diminta penyidik dan dipakai untuk penyidikan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Koordinasikan jawaban atas permintaan penyidik agar tepat waktu dan sesuai prosedur.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tindak pidana.

Pemblokiran rekening

Penghentian sementara transaksi rekening atas permintaan pihak berwenang.

UU P2SK

UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa kewajiban BPR bila penyidik OJK meminta keterangan keuangan seorang nasabah?

JAWABAN

BPR wajib memenuhi permintaan keterangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga terlibat pelanggaran.

TANYA 2

Kapan penyidik OJK boleh memblokir rekening?

JAWABAN

Sebelum dan saat tahap penyidikan, terhadap orang yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana sektor jasa keuangan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan (tanggal berlaku di OJK 07–08–2023); mencabut POJK 22/POJK.01/2015.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap POJK 16/2023 belum dibaca; tata cara teknis permintaan keterangan dan pemblokiran rekening, serta sanksi bagi LJK yang tidak memenuhi, belum dipastikan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(POJK-Penyidikan).aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.